KEBEBASAN SIPIL DI IRAQ

(STUDI AKSI ISIS TERHADAP MINORITAS KRISTEN YAZIDI)

SKRIPSI

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

RIZA UMBARA

14370085

PEMBIMBING

Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2018

ABSTRAK

Etnis Yazidi merupakan minoritas agama/etnis berbahasa Kurdi yang telah mempertahankan kepercayaan mereka berdasarkan adat turun temurun. Kelompok ini tinggal di Provinsi Nineveh di Iraq utara. Komunitas lain berada di Transkaukasia, Armenia, Azerbaijan, Turki, dan Suriah. Kelompok ini sebenarnya adalah sekte agama yang menyembah satu Tuhan dan menghormati tujuh malaikat. Pada dasarnya, latar belakang dari penulisan ini adalah kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2014 yang menjadi topik perbincangan dunia internasional mengenai aksi pembunuhan militan ISIS terhadap enis Yazidi di Iraq. Hal ini berladaskan bahwa ISIS ingin memurnikan Iraq dan negara-negara tetangga dari pengaruh non-Islam. Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana regulasi kebebasan sipil di Iraq terhadap entis minoritas seperti etnis Yazidi dan bagaimana tinjauan pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi.

Untuk menjawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan teori *siyasah dusturiyah*, dalam teori *siyasah dusturiyah* ini di dalamnya mencakup persoalan imamah yaitu bagaimana pentingnya sebuah perumusan suatu perundang-udangan yang diatur oleh seorang pemimpin. Peneliti juga melihat pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi dari sudut pandang *siyasah syar'iyyah*, dalam teori *siyasah syar'iyyah* ini yang di dalamnya mencakup konsep hukum-hukum dan hak-hak bagi anak Adam yaitu hukum-hukum dan hak-hak setiap manusia yang dijamin dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) menggunakan metode deskriptif-analisis, dimana objek kajiannya adalah kebebasan sipil di Iraq.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana regulasi kebebasan sipil di Iraq, pengaturan bagi etnis minoritas seperti etnis Yazidi. Disamping itu juga, penulisan ini juga bertujuan bagaimana Islam melihat aksi pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi.

Pada akhirnya, penelitian ini menemukan bahwa regulasi kebebasan sipil di Iraq tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah* dalam hal kebebasan dalam beragama, kebebasan rasa aman, kebebasan untuk memperoleh tempat tinggal dan kebebasan untuk berpergian. Dalam konsep *siyasah syar'iyyah* melihat pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS bahwa di sini peneliti melihat aksi tersebut melanggar konsep hukum-hukum dan hak-hak anak Adam, dari konsteks penyesuaian dengan prinsip-prinsip dilihat dari kacamata Islam, hal tersebut juga berdasarkan sebagaimana hak-hak warga negara dalam suatu negara.

Kata kunci: etnis Yazidi, ISIS, berkeyakinan, aksi, Iraq.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riza Umbara

NIM : 14370085

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 24 April 2018

Peryataan,

METERAI TEMPEL
TGL 20
F95CEAFF009712946
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Riza Umbara

NIM : 14370085

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Riza Umbara
NIM : 14370085
Judul Skripsi : Kebebasan Sipil di Iraq (Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan demikian kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 April 2018
Pembimbing

Dr. M. NUR, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl.MarsdaAdisuciptoTelp. (0274) 512840 Fax. (0274)545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/TS/PP.00.9/1818/2018

Tugas Akhir dengan Judul : KEBEBASAN SIPIL DI IRAQ (STUDI AKSI ISIS TERHADAP MINORITAS YAZIDI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RIZA UMBARA
Nomor Induk Mahasiswa : 14370085
Telah diujikan Pada : Kamis, 19 Juli 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II

Drs. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Yogyakarta, 19 Juli 2018
UIN SunanKalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“Don't die before your death”

-Muniba Mazari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Untuk masa yang menyenangkan dalam hidup, untuk pagi yang membuat hal mustahil menjadi nyata, dan untuk hidup ketika mengambil lebih dari apa yang diberi.

“Karya ini saya persembahkan untuk (alm) Papa dan Mama yang menjadi inspirasi saya, Mama yang selalu terjaga dan berdo’a pada sepertiga malam terakhir. Untuk kakak sebagai motivator terbaik keluarga dan untuk dua hari yang panjang dalam sejarah pagi.”

KATA PENGANTAR

بسم الله الّرحمن الّرحيم

الحمدلله رب العلمين، وبه نستعين على أمورالدّنيا والدّين، والصّلاةوالسّلام على أشرف الأنبياءوالمرسلين، سيّدناومولانامحمّدوعلى أله وأصحابه أجمعين، أمّابعد

Segala puji bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah swt., yaitu Agama Islam.

Berkat rahmat dan karunia-Nya penyusun telah menyelesaikan skripsi yang berjudul **"KEBEBASAN SIPIL DI IRAQ (STUDI AKSI ISIS TERHADAP MINORITAS KRISTEN YAZIDI)"** secara lancar. Terwujudnya skripsi ini tidak terlepas dari partisipasi dan bantuan berbagai pihak. Penyusun juga tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW., M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara.
4. Bapak Dr. M. NUR, S.Ag., M. Ag selaku pembimbing, yang telah dengan sepenuh hati mengarahkan dan membimbing untuk menyelesaikan skripsi ini, semoaga seluruh kebaikan bapak di balas oleh Allah SWT.
5. Bapak dan Ibu Dosen Beserta Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
6. Papa dan Mama (alm. Erdisyah dan Rosita) yang menjadi inspirasi saya dan kakak perempuan (Effionora) serta kakak laki-laki saya (Argi Nato) dan

kakak ipar saya, yang tak pernah berhenti menyemangatiku, mendo'akanku. Semoga kalian senantiasa ada dalam lindungan-Nya.

7. Dokter dan perawat Bhakti Wara Pangkalpinang, yang selalu sabar merawat dan menyemangati.
8. Keluarga besar bapak Junaidi di Yogyakarta, yang Namanya tidak bisa saya sebutkan satu per satu.
9. Penghuni Kontrakan NAD, merupakan bagian dari keluarga selama di Yogyakarta.
10. Kepada teman-teman Hukum Tata Negara 2014 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Pelulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh, karena itu penulis mohon maaf jika ada salah dalam penulisan skripsi ini. Paling utama hanya kepada Allah lah penyusun memohon ampunan atas segala kesalahan dan meminta agar selalu diberi petunjuk untuk menjadi lebih baik lagi.

Yogyakarta, 24 April 2018

Penyusun

Riza Umbara
NIM. 14370011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

ABSTRAK ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... **iv**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB ..... **vi**

MOTTO ..... **xii**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **xiii**

KATA PENGANTAR ..... **xiv**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 4
D. Telaah Pustaka 5
E. Kerangka Teori 14
F. Metode penelitian 17
G. Sistematika Pembahasan 19

BAB II : ISLAM, NEGARA, DAN REGULASI **21**

A. Islam 21
B. Negara dan Kebebasan Sipil 23
   1. Pemikiran Tentang Negara 23
   2. Kebebasan Sipil 28
C. Regulasi 31
   1. Islam Tentang Kebebasan 32
   2. Pengaturan Islam Tentang Kebebasan 33

D. Siyasah Dusturiyah 34
1. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah 36
2. Imamah 37
E. Siyasah Syar'iyyah 40
1. Hukum-hukum dan Hak-hak Bagi Anak Adam 42
2. Hak-hak Anak Adam 44

BAB III : IRAQ DAN KEBEBASAN SIPIL 48

A. Demografi Iraq 48
B. Sejarah ISIS dan Kristen Yazidi di Iraq 51
C. Kristen Yazidi 57
D. Regulasi Kebebasan Sipil di Iraq 59
1. Ketaatan Rakyat Terhadap Pemerintah 58
2. Penegakan Keadilan 59
3. Mengedepankan Azas Musyawarah 61
E. Aksi ISIS Terhadap Kristen Yazidi dalam Berkeyakinan 64

BAB IV : TELAAH MENGENAI KEBEBASAN SIPIL DI IRAQ 68

A. Pandangan Siyasah Dusturiyah Mengenai Regulasi Kebebasan Sipil di Iraq 68
B. Tinjauan Siyasah Syar'yyah Mengenai Pemaksaan Berkeyakinan yang Dilakukan ISIS 74

BAB V : PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86
B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN I

1. Daftar Terjemahan I
2. Konstitusi Iraq II
3. Riwayat Hidup Penulis III

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kelompok Yazidi merupakan minoritas agama/etnis berbahasa Kurdi yang telah mempertahankan kepercayaan mereka berdasarkan adat turun temurun.[1] Kelompok ini tinggal di Provinsi Nineveh di Iraq utara. Komunitas lain berada di Transkaukasia, Armenia, Azerbaijan, Turki, dan Suriah. Kelompok ini sebenarnya adalah sekte agama yang menyembah satu Tuhan dan menghormati tujuh malaikat. Kepercayaan mereka diyakini berasal dari zaman Zoroastrianisme Persia, yang berlangsung sebelum kedatangan Kristen dan Islam.[2]

Praktek dan spiritualitas kelompok Yazidi ini meliputi sejumlah elemen dan tradisi Kristen, Islam dan Yahudi. Para pengikutnya meyakini bahwa mereka diciptakan terpisah dari manusia lainnya dan merupakan keturunan Adam, namun bukan Hawa. Pada dasarnya juga Etnis Yazidi, yang bukan Arab atau Muslim, merupakan sebuah suku yang memeluk kepercayaan kuno dan berjumlah tak lebih dari lima ratus ribu orang yang terkonsentrasi di wilayah Iraq yang tak jauh dari perbatasan dengan Suriah.

---

[1] Megah Cinthya. *Peran UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017).* (Jurnal Online Mahasiswa: Universitas Riau) Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober. 2017. hlm. 2.

[2]http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-08-08/yazidi-minoritas-agama-di-irak-yang-keberadaannya-terancam/1354650. Diakses Pada Tanggal 02 Desember 2017. Jam 11:27 WIB.

Pada tanggal 11 Agustus 2014[3], kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) membunuh sedikitnya 500 warga sekte Yazidi di Irak. Pada hari itu juga Menteri Hak Asasi Manusia Irak, Mohammed al-Sudani melaporkan bahwa pembunuhan masal tersebut menambah daftar panjang kekejaman yang dilakukan oleh kelompok ISIS di Irak. Tidak berhenti sampai disitu, kelompok ISIS menentang adanya Etnis Yazidi tersebut pertentangan ini berlanjut dengan melakukan tindakan Genosida yakni tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian, bangsa, etnis, ras atau kelompok agama. ISIS sendiri menindas etnis Yazidi yang berbahasa Kurdi itu karena mereka tidak memeluk kepercayaan yang diturunkan mulai dari Nabi Abraham atau Ibrahim hingga ke agama Islam.

Laporan Perserikatan Bangsa-bangsa yang dirilis pada Kamis 16 Juni 2016 menjabarkan bahwa ISIS secara sistematis menculik kaum Yazidi sejak Agustus 2014 dengan tujuan menghapus identitas mereka. Dalam sebuah laporan media sebelumnya juga disebutkan, lebih dari 1.100 orang Kristen telah dibunuh ISIS. Belum lagi yang diculik, diperkosa, dijual sebagai budak dan diusir dari rumah mereka, yang diikuti dengan perusakan gereja.

Kebebasan sipil merupakan hak seseorang untuk melakukan transaksi, menanggung tugas dan kewajiban, memiliki benda bergerak

---

[3] https://international.sindonews.com/read/889847/43/isis-bunuh-500-warga-yazidi-korban-dikubur-hidup-hidup-1407719906. Diakses Pada Tanggal 02 Desember 2017. Jam 11:40 WIB.

maupun tidak bergerak, dan mengelola segala sesuatu miliknya.[4] Pada ketetapannya dalam kebebasan hak-hak sipil, agama Islam tidak membeda-bedakan manusia karena perbedaan bangsa, tingkatan kedudukan, atau keturunan. Islam juga menetapkan orang kafir Dzimmi yang tinggal di negara Islam atau di negara yang tunduk kepada pemerintahan Islam pada dasarnya mempunyai hak-hak sipil yang sama dengan orang-orang Islam.

Kepercayaan etnis yazini ini tidak semata-mata diterima oleh Kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi, bahkan pimpinan kelompok tersebut menawarkan para warga monoritas di Irak khususnya etnis yazidi untuk pindah keyakinan atau memilih mati.[5] Dari hal tersebut bisa di lihat bahwa salah satu alasan kelompok pimpinan Abu Bakar Al-Baghdadi menyerang serta melakukan genosida terhadap etnis Yazidi. Dimana bahwa tindakan Genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk memusnahkan secara keseluruhan atau sebagian, bangsa, etnis, ras atau kelompok agama.

Konsekuwensi yang terjadi akhirnya merujuk kepada, hak-hak sipil bagi etnis Yazidi yang memerlukan perlindungan dan pengakuan dari pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, jaminan atas penegakan hukum merupakan tanggung jawab negara terhadap pelanggaran-pelanggaran yang ada. Bagir Manan mantan ketua Mahkamah Agung, juga menjelaskan bahwa hak-hak sipil merupakan hak-hak negative

---

[4] Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan)*. (Bandung: Sinar baru Algensindo) 1994, Hlm. 1.

[5] https://international.sindonews.com/read/889847/43/isis-bunuh-500-warga-yazidi-korban-dikubur-hidup-hidup-1407719906. Diakses Pada Tanggal 09 Desember 2017. Jam 16:35 WIB.

(*negative rights*) dalam arti negara atau pemerintah dilarang mencampuri. Sedangkan sebaliknya, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya serta hak-hak solidaritas adalah hak-hak positif (*positive rights*) yang menghendaki campur tangan negara atau pemerintah.[6]

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang regulasi kebebasan sipil etnis yazidi berdasarkan Teori Siyasah Dusturiyyah serta, bagaimana pandangan Siyasah Syar'iyyah tentang pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji dan dianalisis:

1. Bagaimana siyasah dusturiyah melihat regulasi kebebasan sipil di Iraq?
2. Bagaimana tinjauan siyasah syar'iyyah tentang pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Kristen Yazidi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
   a. Untuk menjelaskan bagaimana regulasi kebebasan sipil etnis yazidi di Iraq dilihat dari siyasah dusturiyah.
   b. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan siyasah syar'iyyah tentang pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Kristen Yazidi.
2. Manfaat penelitian
   a. Manfaat teoritis

[6] Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: PADJADJARAN) Jurnal Ilmu Hukum volume 3 No. 3. 2016, hlm. 460-461.

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam implementasi kebijakan.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai regulasi kebebasan sipil etnis Yazidi di Iraq.

c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Pada dasarnya, telaah pustaka merupakan salah satu etika ilmiah yang dimanfaatkan untuk memberi kejelasan informasi yang sedang dikaji dan diteliti. Sebagaimana salah satu tujuannya untuk mengetahui apa yang sudah dan belum diteliti berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dipilih. Kemudian untuk memberikan gambaran lebih menyeluruh mengenai berbagai variasi perilaku atau fenomena dalam topik penelitian.

Alasanya juga dapat berupa melakukan tinjauan literatur guna menemukan beberapa hal, misalnya gambaran bagaimana penelitian dengan topik yang sama atau mirip telah dilakukan oleh peneliti lain, juga penggunaan konsep-konsep tertentu oleh peneliti lain yang mungkin juga akan digunakan atau setidaknya dianggap relevan dan temuan-temuan empirik oleh peneliti lain yang mungkin dapat dirujuk. Oleh sebab itu, sesuatu yang sangat menarik dalam penelitian kualitatif terkait dengan telaah pustaka ini adalah, bahwa telaah pustaka tetap dilakukan pada saat peneliti mencoba mengupayakan analisis data dan hendak menarik

simpulan. Sehingga, ada kemungkinan peneliti harus membuang sebagian data yang diyakini tidak relevan terhadap pembahasana peneliti , serta mengganti konsep yang telah dijelaskan sebelumnya dengan konsep baru atau konsep lain yang lebih tepat, atau peneliti harus membuang pandangan-pandangan teoritik dan atau temuan peneliti lain yang belakangan diyakini tidak atau kurang relevan lagi untuk diganti dengan pandangan teoritik lain yang sekiranya lebih dapat membantu upaya memahami kecenderungan dari data yang ada.[7]

Pada akhirnya, sebelumnya penyusun menelaah beberapa karya yang dianggap satu tema dengan penyusun skripsi ini. Ada beberapa literature yang bisa dijadikan rujukan maupun perbandingan dalam pembahasan ini, penyusun menemukan beberapa referensi antara lain:

Pertama Jurnal berjudul "*Peran UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017)"*. Dalam Jurnal tersebut menyebutkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2014, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengumumkan bahwa krisis Yazidi merupakan krisis tingkat tertinggi "Darurat Level-3". Hal tersebut terkait skala dan kompleksitas situasi yang dialami etnis Yazidi, menyangkut puluhan ribu orang yang menderita akibat serangan ISIS. Darurat Level-3 menunjukkan perlunya mobilisasi sumber daya tambahan berupa barang, dana dan aset untuk memastikan respon yang lebih efektif untuk kebutuhan kemanusiaan penduduk yang terkena dampak dari pengusiran.

[7] Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: LkiS) 2007, hal. 81.

Pada dasarnya jurnal ini juga menjelasakan bagaimana ISIS, yakni suatu organisasi politik dan militer Islam radikal berupa filsafat politik yang berusaha untuk memaksakan ideologinya berlaku untuk seluruh Muslim maupun non-Muslim. Dari ideologi tersebut muncul aksi serangan besar-bersaran yang hampir dua ratus ribu warga sipil, sebagian besar etnis Yazidi melarikan diri dari pertempuran. Sekitar lima puluh ribu orang melarikan diri ke Pegunungan Sinjar. Di pegunungan ini warga Yazidi terjebak tanpa makanan, air, perawatan medis, menghadapi bencana kelaparan dan dehidrasi. Kelompok ekstrimis ISIS juga memaksa lebih dari 400 ribu warga Yazidi untuk mengungsi.

Akibatnya warga yang pergi meninggalkan negara asalnya atau tempat tinggal sebelumnya, meninggalkan sebagian besar hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Lain dari pada itu pengungsi ini tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena terpaksa meninggalkan negaranya. Maka dari itu, jurnal ini membahasa bagaimana perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. Yakni UNHCR di bawah naungan PBB hadir memberikan perlindungan internasional kepada para pengungsi serta mengupayakan pencarian solusi permanen terhadap masalah pengungsi Yazidi dengan bekerja sama bersama pemerintah negara dalam menangani urusan pengungsi.

Perbedaan dari pembahasan peneliti dari jurnal ini berupa pengaturan serta peran UNHCR dalam mengatasi pengungsian Yazidi di Iraq sedangkan peneliti membahas mengenai bagaimana pengaturan aksi serangan tersebut dikaji menurut Instrumen HAM Internasional berupa

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa.

Kedua, paper yang ditulis oleh Christian dengan judul "Iraq's Yezidis A Religious and Ethnic Minority Group Faces Repression and Assimilation". Paper ini disusun oleh Christian Peacemaker Teams (CPT) atau tim perdamaian di Irak. Dalam paper ini menjelaskan bagaimana para tim keadilan bertemu dengan anggota Asosiasi Akademik & Budaya Yezidi dan Gerakan Politik Yezedi untuk Reformasi dan Kemajuan. Dengan alasan yazidi sangat prihatin karena mereka merasa dipaksa untuk berasimilasi atau di paksa menyesuaikan ke dalam budaya dan identitas Kurdi.

Akibanya yazidi mengalami ketidakadilan dengan cara yang sangat spesifik, mulai dari gangguan pemilihan, hingga ancaman, hingga pertanyaan konstitusional. Kelompok Yazidi juga khawatir bahwa hak mereka sebagai budaya dan etnis yang terpisah akan lenyap di Irak. Perbedaan dengan pembahasan sebelumnya pada paper ini adalah bagaimana kelompok Yazidi di paksa menyesuaikan ke dalam budaya dan identitas Kurdi sebelumnya serta ketidak adilan yang dilalui kelompok yazidi berupa ancaman dan pertanyaan konstitusional.[8]

Ketiga, laporan UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS yang berjudul "They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis". Laporan ini menjelaskan tentang peristiwa kejahatan yang menimpa etnis yazidi, berdasarkan laporan yang di terbitkan pada 15 juni 2016 tersebut disebutkan ISIS telah melakukan kejahatan genosida serta beberapa

---

[8] Christian Peacemaker Teams in Iraq. *Iraq's Yezidis A Religious and Ethnic Minority Group Faces Repression and Assimilation*. 25 September 2005.

kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang di tujukan melawan etnis yazidi, berdasarkan laporan tersebut ISIS juga berusaha menghancurkan etnis yazidi dengan cara pembunuhan masal, perbudakan seksual, penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi serta merendahkan martabat manusia dan pemindahan paksa yang menyebabkan kerugian fisik dan mental yang serius bagi etnis yazidi.

Pada akhirnya juga kondisi kehidupan yang di lalui etnis yazidi ini membawa kematian yang lambat, yang menjadi alasan seperti tindakan untuk mencegah anak-anak yazidi tidak dilahirkan, pemisahan pria dan wanita etnis yazidi, dan trauma mental yang dialami serta juga hal yang sangat di rasakan bagi etnis yazidi berupa pengalihan anak-anak yazidi dari keluarga mereka sendiri dan menempatkan mereka dengan pejuang ISIS.[9] Perbedaan dengan pembahasan sebelumnya pada laporan internasional ini berupa laporan mengenai tidakan-tindakan yang dilakukan ISIS untuk menghapus etnis yazidi serta kondisi etnis yazidi setelah adanya aksi tersebut.

Keempat, dalam buku yang di tulis oleh Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani yang berjudul "Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah". Buku ini diterbitkan di Jakarta atas kerja sama dari beberapa lembaga di Jakarta yakni Freedom institute, Lembaga Survei Indonesia (LSI), The Indonesia Institute (TII), dan Jaringan Islam liberal (JIL) dan individu yang peduli dengan penegakan hak-hak sipil. Salah satu tujuan dari penulisan buku ini adalah penulis mengkritisi tumbuhnya berbagai perda (peraturan daerah) yang bernuansa Syari'ah dan

[9] United Nations Human Rights, *They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidi*, 15 June 2016.

mengadvokasikan perubahannya tersebut. Perbedaan dari pembahasan peneliti dari buku ini adalah berupa dari segi pembahasannya buku ini hanya membahas kebebasan sipil yang di khususkan di Indonesia dan sedangkan untuk studinya buku ini hanya mengkritisi tumbuhnya berbagai perda syaria'ah di Indonesia.[10]

Kelima, dalam buku Ahmed An-Na'im Abdullah yang berjudul "Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Intrenasional dalam Islam membangun standar universal terhadap kebebasan sipil" dalam buku ini Abdullah Ahmed An-Na'im menjelaskan bahwa ia memiliki kesulitan tersendiri dalam hal kebebasan sipil, dimana yang melintasi batas kultural, khususnya agama, adalah bahwa masing-masing tradisi mempunyai kerangka acuan atau *frame of reference* internalnya sendiri, karena masing-masing tradisi menjabarkan logika berfikir ajaran dan ajaran dan norma-normanya dari sumber-sumbernya sendiri. Menurut An-Na'im juga jika suatu tradisi kultural, khususnya berupa agama yang berhubungan dengan tradisi lain, maka kemungkinan yang terjadi adalah hubungan secara negative dan bahkan dengan cara permusuhan, seperti pemusnahan kelompok masyarakat tersebut.[11]

Perbedaab dari pembahan peneliti dari buku ini dimana dekontruksi Syariah ini hanya menjelaskan bagaimana kebebasan sipil itu menurut islam kemudian An-Na'im merumuskan juga dimana tradisi kulturan yakni

---

[10] Ihsan Ali-Fauzi dan Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah*, (Jakarta: Nalar, Cet. Pertama, 2009), hlm. 4.

[11] Abdullah Ahmed An-Na'im. Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Intrenasional dalam Islam. (Yogyakarta: LKiS) 1994, hlm. 308-309.

agama berhubungan dengan tradisi lain maka ada sesuatu yang negatif akan terjadi menurutnya.

Keenam, dalam buku karya Abdul Wahid Wafie, yang berjudul "Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan)" terbitan tahun 1994. Dalam bukunya Abdul Wahid Wafie menjelaskan bahwa kebebasan sipil merupakan hak seseorang untuk melakukan transaksi, menanggung tugas dan kewajiban, memiliki benda bergerak maupun tidak bergerak, dan mengelola segala sesuatu miliknya. Dilain hal juga ia menjelaskan kebebasan sipil di dalam islam tersebut, sebagaimana islam memberikan kebebasan sipil kepada semua orang.[12]

Salah satu perbedaan yang menonjol dari pembahasan peneliti bahwa Abdul Wahid Wafie dalam bukunya ini tidak hanya membahas kebebasan sipil di dalam islam namun ia juga mencoba membandingkan dengan merumuskan kebebasan sipil yang didapatkan dari agama-agama selain islam.

Ketujuh, skripsi yang di tulis oleh Saepul Agna mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "The Wahid Institute dan Gerakan Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Gerakan Sosial". Di lihat dari yang melatar belakangi penelitian skripsi ini berupa penegasan konstitusi maupun ratifikasi kovenan internasional yang merupakan instrumen pokok hak asasi manusia terkait kebebasan beragama. Yang pada akhirnya The Wahid Institute lembaga yang mewujudkan prinsip dan cita-cita intelektual Abdurrahman Wahid dalam membangun pemikiran Islam, seperti yang di jelaskan skripsi ini berupa

---

[12] Abdul Wahid Wafie, *Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan)*. (Bandung: Sinar baru Algensindo) 1994, hlm. 2.

menjalankan gerakan kebebasan beragama. Ketika intensitas tinggi pelanggaran kebebasan beragama mengemuka, gerakan kebebasan beragama Wahid Institute menjalankan beragam usaha mengarah tiga level permasalahan kebebasan beragama, yaitu, regulasi dalam struktur negara termasuk relasi negara dengan Majelis Ulama Indonesia.[13]

Wahid Institute dan Gerakan Kebebasan Beragama juga menjadi objek kajian skripsi ini, dimana penulis skripsi tersebut menggunakan Wahid Institute tersebut buka hanya sebagai objek kajian namun juga untuk membedah bagaimana membangun pemikiran Islam dalam gerakan sosial, ini juga merupakan salah satu perbedaan dari kajian penulisan skripsi penulis.

Kedelapan, buku yang ditulis oleh Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (Eds) yang berjudul "Islam dan Kebebasan: Argumen Islam untuk Masyarakat Bebas (terjemahan)" yang di terjemahkan oleh Suryo Waskito tahun 2017. Dalam pembahasan buku ini ia menjelaskan bagaimana pengertian umum kebebasan dan islam khususnya pada bab Kebebasan, agama, dan Islam. Kebebasan dirumuskan menjadi dua yakni perbedaan antara kebebasan negatif dan positif. Kebebasan menurut buku ini artinya tidak mengalami kekerasan sehingga orang tersebut bisa menjalani hidup sesuai keinginannya sendiri. Kebebasan melahirkan ruang pribadi bagi seseorang dan ia bebas menentukan keputusannya sendiri. Agar seseorang bisa merasakan kebebasan, keputusan dan/atau tindakan mereka tidak harus sesuai dengan gaya hidup yang ideal. Satu-satunya kriteria hanyalah aktivitas tersebut tidak mengganggu individu lain.

---

[13] Saepul Agna, *The Wahid Institute dan Gerakan Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Gerakan Sosial*, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012) hlm. 2-3.

Tidak sampai di situ juga, dalam buku ini juga membahas konsep kebebasan positif, dimana dapat digunakan oleh orang yang berpikiran religius maupun non-religius. Bagi individu non religius, contohnya, seseorang bisa dianggap bebas jika mereka mampu menahan godaan budaya konsumerisme atau diartikan budaya yang berlebih-lebihan.[14]

Kesembilan, paper yang di tulis oleh Mahasiswa FKIP Universitas Lampung Diana Puspita dkk, yang berjudul "Irak Pasca Invansi Amerika Serikat". Salah satu tujuan dari penelitian paper ini yakni untuk mengetahui perubahan sosial di Irak akibat invasi AS. Perubahan sosial yang muncul di Irak pasca invasi diantaranya berupa adanya konflik antara Sunni dan Syiah, kemudian merosotnya moral rakyat Irak dan merajalelanya perkembangan terorisme di Irak pasca invasi Amerika Serikat di Irak. Juga yang dirasakan dari invansi tersebut adalah adanya konflik antara kelompok Syiah dan Sunni serta Kurdi, yang mana ketiga kelompok tersebut berlomba untuk memperebutkan kursi kekuasaan di Irak.[15]

Perbedaan dari pembahasan peper tersebut yakni dalam peper ini penulis melakukan penelitian mengkhususkan pada perubahan sosial yang terjadi di Irak pasca invansi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Dalam pembahan paper ini juga bagi peneliti bisa menjadi bahan tambahan untuk penyusunan skripsi peneliti tentang Irak.

Kesepuluh, skripsi yang disusun oleh Ahmad Khoirul Mizan mahasiswa fakultas adab dan budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

---

[14] Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (Eds), *Islamic Foundations of a Free Society*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Suryo Waskito (London: The Institute of Economic Affairs, 2016) hlm. 13-14.

[15] Diana Puspita dkk, *Irak Pasca Invansi Amerika Serikat*, Paper Mahasiswa FKIP Universitas Lampung, (2013) hal. 1-2

dengan judul "Etnis Kurdi: Perjuangan Memperoleh Otonomi Khusus di Irak (1920-1921)" skripsi ini menjeaskan bagaimana etnis kurdi berjuang memperoleh otonomi khusus bagi mereka. Pasca perjanjian sevres 1920, dikatakan etnis kurdi berjuang menuntut pemerintah Irak untuk merealisasikan perjanjian tersebut, yakni etnis kurdi di perbolehkan mendirikan pemerintahan sendiri. Perjuangan etnis kurdi ini tidak semata-mata diterima oleh pemerintah Irak, bahkan ada yang melakukan genosida terhadap tuntutan etnis kurdi ini.[16]

Dalam penulisan skripsi ini terdapat beberapa perbedaan dari penulisan skripsi yang sedang peneliti kaji yakni untuk pembahasan mengenai pemerintahan Irak bisa menjadi tambahan bahan untuk peneliti nanti. Walaupun dilain hal skripsi ini membahas etnis kurdi namun tendapat persamaan kajiian yakni kajian tentang pemerintahan Irak.

E. Kerangka Teori

1. Teori Siyasah Dusturiyyah

Siyasah dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara, antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.[17] Di samping itu membahas juga hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-

---

[16] Ahmad Khoirul Mizan, *Etnis Kurdi: Perjuangan Memperoleh Otonomi Khusus di Irak (1920-1921)*, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015) hlm. 1-3

[17] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi doktrin politik islam*, (Jakarta: Kencana Pernada Group, 2014), hlm. 177.

hak warga negara yang wajib dilindungi. Seperti kebebasan sipil masyarakatnya.

Dalam siyasah dusturiyyah diatur pula hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat, kepala negara atau imam seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. Karena kedudukannya yang sama dengan manusia lainnya, kepala negara juga harus tunduk kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Kepala negara dapat dikenai hukum pidana atas kejahatan yang dilakukannya dan perbuatan-perbuatannnya yang melampaui batas kewenangannya.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori siyasah dusturiyyah khususnya untuk membedah dan melihat sejauh mana regulasi kebebasan sipil etnis yazidi di Iraq, dimana pengaturan tersebut belum dirasakan oleh etnis yazidi secara menyeluruh.

2. Teori Siyasah Syar'iyyah

Pada dasarnya, siyasah menurut Bahantsi Ahmad Fathi adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia sesuai dengan syara'.[18] Dalam artian, pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Hal ini menegasakan bahwa wewenang membuat segala bentuk hukum, peraturan da kebijaksanaan yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan negara dan urusan umat guna mewujudakan kemaslahatan umum terletak pada pemegang kekuasaan,

[18] Suyuthi Pulungan, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press) 1997, hlm. 24.

dalam artian pemerintah. Karena itu segala bentuk hukum, pengaturan dan kebijaksanaan siyasah yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat.

Sejalan dengan hal tersebut, definisi siyasah lebih dipertegas oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syariyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan Negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa atau semangat syariat dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan. Dalam artian juga untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dilain hal untuk mewujudkan dari tujuan tersebut ada beberapa urgensi dalam pandangan syariat islam, berupa syariat yang diturunkan Allah untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh seseorang.[19] Seperti hak hidup, hak milik, hak berkecukupan dalam hidup, hak keamanan dalam beragama, jiwa, kehormatan diri, masalah-masalah sosial, keturunan, dan kepemimpinan.[20] Dilihat dari tujuan dan objek kajian siyasah Syar'iyyah tersebut maka peneliti mengambil fokus kajian hukum-hukum dan hak-hak dalam bukunya Ibnu Taimiyah.

F. Metode Penelitian

Penelitian berupa serangkaian kegiatan yang membantu pengembangan ilmu lain dalam mengungkapkan suatu kebenaran. Namun kegiatan membantu pengembangan ilmu yang lain itu mengandung pernik-pernik yang masing-masing dapat bervariasi sesuai dengan materi, tujuan

---

[19] Yusuf Al-Qardhawy, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) 1997, hlm. 71.

[20] Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti) 1995, hal. 139.

sifat dan cara penelitiannya.[21] Untuk itu peneliti memaparkan beberapa metode yang akan digunakan dalam kajian penelitian ini:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian pustaka *(library research)* yang dimana objek kajian-nya adalah Kebebasan Sipil di Iraq (Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi) berdasarkan data yang dikumpulkan pada buku, artikel, skripsi, paper dan jurnal.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif-analitis ini merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan, menguraikan, dan menganalisis persoalan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.[22] Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang regulasi Kebebasan Sipil di Iraq (Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi) dan aksi ISIS terhadap etnis Yazidi kemudian di analisis dengan siyasah dusturiyyah dan siyasah syar'iyyah.

3) Pendekatan Penelitian

Dalam hal ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini yakni Regulasi Kebebasan Sipil di Iraq (Studi Aksi ISIS Terhadap Minoritas Kristen Yazidi). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mendekati permasalahan dari segi hukum dan norma.

4) Teknik Pengumpulan Data

---

[21] F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Granda) 2017, hal. 8.

[22] Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012) hal. 104.

Teknik pengumpulan data di kumpulkan dan dicermati dari aspek validitas dan relevansinya dengan objek kajian yang kemudian diuraikan dengan sistematis. Data-data penelitian ini :

Pertama, Data Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah tentang regulasi kebebasan sipil di irak dan aksi ISIS terhadap minoritas Kristen Yazidi.

Kedua, Data Sekunder, penelitian dalam skripsi ini diambil dari buku-buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah yang akan dikaitkan dengan teori siyasah dusturiyah dan siyasah syar'iyyah.

5) Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data ini juga bersifat deduktif yakni penyusun memaparan hal-hal yang bersifat umum kemudian menyebar ke hal-hal yang khusus. Data yang telah diperoleh disusun kemudian mendeskripsikannya dengan aksi yang dilakukan kelompok ISIS. Dengan demikian penulis dapat memudahkan untuk menganalisis permasalahan tersebut dengan teliti.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengurai dan menjawab pokok masalah dalam skripsi ini, penulis menyusunnya dalam beberapa bab. Masing-masing bab di antaranya ialah;

Bab pertama berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab; latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas dan mendeskripsikan tentang regulasi kebebasan sipil dan membahas tentang teori siyasah dusturiyah serta teori siyasah syar'iyyah bermaksud untuk menjelaskan teori-teori yang akan dipakai untuk mendalami regulasi kebebasan sipil tersebut sekaligus melihat prosedur perundang-undangan yang bertentangan.

Bab ketiga membahas dan menjelasakan pandangan siyasah dusturiyah dan siyasah syar'iyyah tentang aksi ISIS terhadap minoritas Kristen Yazidi yang mengacu kepada kebebasan sipil dan Hak Asasi Manusia serta latar belakang terjadinya aksi tersebut dan kebebasan sipil yang menjadi fokus kajian.

Bab keempat membahas tentang analisis teori yang akan dikaji oleh penulis yang berkaitan dengan teori siyasah dusturiyah dan mencoba mengaitkan teori tersebut dengan aksi ISIS terhadap minoritas Kristen Yazidi serta pandangan siyasah syar'iyyah tentang pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS. Analisis ini didukung dengan data-data yang sudah ada. Sehingga penulis dapat mengungkapkan fakta penelitian.

Bab kelima, penutup yang memuat tentang kesimpulan dan saran dari uraian penulis skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan sistem tatanegara bahwa negara dan pemerintah bertanggung jawab dalam keadaan apapun terhadap masyarakat, dengan menunaikan segala amanah. Dalam artian seperti aksi berkeyakinan yang dilakukan ISIS terhadap etnis Yazidi, pemerintah Iraq harus mengatur hal-hal yang menjadi hak-hak masyarakat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan. Kemudian, untuk menjunjung tinggi tujuan negara sebagaimana dikatakan untuk menegakkan kehidupan yang utuh dan sempurna, bahwa semua masyarakat mentaati peraturan yang telah ditetapkan negara, tanpa memandang persamaan hak yang ada, perbedaan bahasa, suku dan warna kulit.

Disebutkan juga dalam pemerinthan Islam bahwa, setiap orang dalam pengertian masyarakat tidak diperbolehkan mencari kekuasaan dan kedudukan, dengan mengerjar jabatan untuk memimpin. Dijelaskan juga bahwa kelompok ISIS berusaha keras untuk mendirikan khalifah atau negara Islam dalam sebuah negara, dengan cara mempromosikan pemimpinnya sebagai pemimpin dunia, dengan menjatuhkan negara-negara yang bertentangan dengan syariat Islam. dilain hal juga ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi tujuan dari suatu negara.

Kesimpulannya, pertama jika dilihat dari kacamata *Siyasah Dusturiyah* mengenai regulasi kebebasan sipil di Iraq tersebut tidak sesuai dengan apa yang menjadi prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyah*. Dilihat dari konsteksnya, *Siyasah Dusturiyah* dalam sistem pemerintahan, perumusan

perundang-undang. Dimana kebebasan sipil warga Iraq diatur dalam konstitusi Iraq tahun 2005, namun pada prinsipnya pengaturannya kurang efektif, sebagai contoh terlihat sejak konstitusi tersebut diundangkan masih banyak terjadi pelanggaran di wilayah Iraq.

Kesimpulan kedua, dilihat dari pandangan *Siyasah Syar'iyyah* pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Syar'iyyah*, yaitu:

1. Aksi pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS tersebut dilihat dari *Siyasah Syar'iyyah*, sangatlah bertentangan dari apa yang di ajarkan dalam Islam, menyangkut juga dalam masalah bertentangan dengan jiwa, sebagaimana dijelasakan salah satunya adalah adannya kebebasan berkeyakinan dalam jiwa seseorang.
2. Sebagai masyarakat, ISIS harus mentaati peraturan yang telah ditetapkan dalam sebuah negara.

Aksi pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS memang tidak sesuai dengan teori *Siyasah Dusturiyah*, dalam totalitasnya, kewajiban manusia kepada Allah menyangkup juga kewajibannya kepada setiap individu yang lain. Maka secara umum hak-hak setiap individi itu dilindungi oleh segala kewajiban dibawah hukum Ilahi. Sebagaimana suatu negara secara bersama-sama dengan rakyat harus tunduk kepada hukum, yang berarti negara juga harus melindungi hak-hak individual. Pada akhirnya, bahwa adanya kewajiban antara satu individu dengan individu lainya, termasuk juga dalam masalah bermasyarakat.

Sejalan dengan sejarahnya bahwa pembentukan konstitusi Iraq tidak terlepas dari bangkitnya masyarakat Iraq terbebas dari keterpurukan

dan membangun bangsa hukum. Walaupun konstitusi ini telah di berlakukan dengan sebuah cita-citanya, masih banyak terjadinya penindasan penindasan di wilayah Iraq. Usaha pemerintah Iraq tidak begitu berhasil dalam mengatasi masalah-masalah yang ada di Iraq, seperti menyangkut kebebasan sipil masyarakat. Melalui konstitusi Iraq yang berlandaskan berdasarkan Islam dalam sumber-sumber hukumnya. Militan ISIS menyerbu desa-desa Yazidi, membunuh masyarakat etnis Yazidi karena mereka tidak mempercayai agama Islam.

Sejalan dengan pemberlakukan konstitusi tersebut, hal-hal yang ingin dicapai dalam sebuah negara tidak begitu membuahkan hasil yang bagus dalam pemerintah Iraq. Terlihat dimana berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Iraq. Salah satunya kasus mengenai enis Yazidi yang mencuri perhatian dunia internasional. Dilihat dari *Siyasah Dusturiyah* jelas bahwa sistem pemerintahan atau regulasi yang dimiliki pemerintahan Iraq tidak sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah*, salah satunya pengaturan kebebasan sipilnya. Dimana tidak adanya pengaturan serius antara warga minoritas dan warga mayoritas, serta masyarakat muslim dan nonmuslim.

Menurut konstitusi Iraq tahun 2005 pasal 14 menyatakan bahwa Iraq adalah sama didepan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, etnis, kebangsaan, asal, warna kulit, agama, sekte, keyakinan atau pendapat, atau status ekonomi atau sosial. Pengaturan mengenai persamaan warga negara didepan hukum telah diatur, namun pengaturan lebih lanjut mengenai pelangaran mengenai pasal tersebut tidak diatur sehingga masih terjadi masalah, seperti kasus mengenai etnis Yazidi tersebut.

B. Saran

Dilihat dari beberapa laporan media internasional, pada bulan Agustus 2014 serangan kelompok militan ISIS di daerah Sinjar memakan begitu banyak korban jiwa bagi keluarga etnis Yazidi. Disisi lain pemerintah harus berperan aktif dalam menangani aksi yang dilakukan ISIS tersebut, dimana peran pemerintah sangat dibutuhkan, sebagaimana pemerintah harus menjunjung tinggi hak-hak warga negara dalam suatu negara.

Dalam pembahasannya ada beberapa saran yang diusulkan penulis, melihat pemaksaan berkeyakinan yang dilakukan ISIS serta mengenai regulasi kebebasan sipil di Iraq, yaitu:

1. Melihat dari sisi regulasi di Iraq bahwa konstitusi Iraq perlu pengaturan lebih jelas mengenai sanksi pidana bagi yang melanggar peraturan-peraturan perundangan tersebut.
2. Adanya pengaturan bagi kelompok-kelompok tertentu, seperti kelompok ISIS.

Aksi yang dilakukan ISIS ini menjadi perhatian dunia internasional, sebagaimana PBB melaporkan bahwa salah satu aksi pembunuhan yang dilakukan militan ISIS menjerumus kepada Genonida suatu kelompok atau etnis tertentu. Lain hal dengan pemerintah Iraq, jika negara Iraq ingin dikatakan sebagai salah satu negara Islam dimana sumber dasar undang-undang diambil melalui sumber Al-Qur’an dan hadis, maka pemerintah Iraq harus teliti dalam perumusan suatu undang-udang, sebagaimana Islam tidak mencerminkan dari apa yang dilakukan oleh kelompok ISIS tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

H. Zaini Dahlan dan Azharuddin Sahil, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya*. (Yogyakarta: UII Press, Edisi Ketiga Cet. Pertama, 1999).

B. Undang-undang

Konstitusi Iraq Tahun 2005.

Konvensi Internasional Tentang Perlindungan Terhadap semua orang dari tindakan penghilangan secara paksa. Terjemahan, 23 September 2005.

C. Buku-buku

A. Rahmad Rosyadi dan H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Persepektif Tata Hukum Indonesia*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006).

Ahmed An-Na'im Abdullah, *Dekontruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia, dan Hubungan Intrenasional dalam Islam*. (Yogyakarta: LKiS) 1994.

Al-'Utsaimin Muhammad bin Shalih, *Politik Islam: Ta'liq Siyasah Syar'iyah Ibnu Taimiyah* (Jakarta Timur: Griya Ilmu, 2014)

Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Darul Falah, 2006)

Al-Qardhawy Yusuf, *Fiqih Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar) 1997.

Assad dan Muhammad Haidar, *ISIS Organisasi Teroris paling mengerikan abad ini*. (Jakarta Selatan: Zahira, 2014)

As-Salus Ali Ahmad, *Aqidah al - Imamah 'Inda as - Syi'ah Al - Isna 'Asyariyah*, (Jakarta: Gema Insani Prees, 1997)

Badaius Shana'I Al-Kasani, (Al-Mamadani, Jilid Ke VII).

Djazuli A., *Fiqh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'* (Jakarta: Kencana, 2003. Cet. 2)

Djazuli A., *Fiqh Siyasah: Implimentasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah'* (Jakarta: Kencana, 2007. Cet. 3)

Haryono Ammar, *Islam Fazlur Rahman: Terjemahan, diterjemahkan oleh Ahsin Mohammad* (Bandung: Pustaka, 1994)

Hussain Syekh Syaukat, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1996).

Istanto F. Sugeng, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: CV Granda) 2017.

Jawas Yazid bin Abdul Qadir. *Prinsip Dasar Islam: Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang Shahih*. (Bogor: Pustaka At-Taqwa) 2014.

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih (Terjemahan),* Rineka Cipta, Jakarta: 2005.

Khallaf Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993).

Maududi Maulana Adul A'la, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2005)

Mustolah Maufur, *Siyasah Syar'iyyah Etika Politik Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Nasution Harun, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya.* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)

Pawito. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. (Yogyakarta: LkiS) 2007.

Pulungan Suyuthi, *Fikih Siyasah; Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Rajawali Press) 1997.

Pulungan Suyuthi, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)

Romli S A, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999).

Said Ali As'ad, *Al-Qaeda Tinjauan Sosial-politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya*. (Jakarta: LP3ES, 2014)

Sukandarumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti pemula*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) 2012.

Sukardja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014)

Susi Dwi Harijanti dan Bagir Manan, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*. (Bandung: PADJADJARAN) Jurnal Ilmu Hukum volume 3 No. 3. 2016.

Taimiyah Ibnu. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. (Surabaya: Risalah Gusti, 1995)

Taj Abdurrahman, *Al-siyasah Al-syar'iyyah wa Al-Fikih Al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar Al-Ta'lif, 1993)

Wahid Wafi Ali Abdul. *Prinsip Hak Asasi Dalam Islam: Terjemahan*. (Solo: Cv. Pustaka Mantiq). Cet. 1991.

Wahid Wafie Abdul, *Kebebasan Dalam Islam (Terjemahan)*. (Bandung: Sinar baru Algensindo) 1994.

Wahyudi H. Alwi. *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Widodo L. Amin, *Fiqih Siyasah Dalam Sistem Kenegaraan dan Pemerintah*. (Yogyakarta: Sumbangsih Offset, 1994)

D. Skripsi

A. Zainul Muttaqin, *Konsep Takfir Islamic State Of Iraq and Syiria* (Skripsi Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015)

Agna Saepul, *The Wahid Institute dan Gerakan Kebebasan Beragama di Indonesia: Perspektif Gerakan Sosial*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2012).

Khoirul Mizan Ahmad, *Etnis Kurdi: Perjuangan Memperoleh Otonomi Khusus di Irak (1920-1921)*, Skripsi Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, (2015).

E. Internet

https://international.sindonews.com/read/889847/43/isis-bunuh-500-warga-yazidi-korban-dikubur-hidup-hidup-1407719906. Diakses Pada Tanggal 09 Desember 2017. Jam 16:35 WIB.

http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2014-08-08/yazidi-minoritas-agama-di-irak-yang-keberadaannya-terancam/1354650. Diakses Pada Tanggal 02 Desember 2017. Jam 11:27 WIB.

http://www.bendera.web.id/id3/1246-1143/Irak_12998_bendera.html. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018. Jam 08:17 WIB.

http://dilihatya.com/2975/pengertian-regulasi-menurut-para-ahli-adalah. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018. Jam 19:36 WIB.

http://www.masjidalihsan.com/sejarah-panjang-republik-irak-dan-berkuasanya-partai-baath/. Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2018. Jam 20:10 WIB.

https://kainsa.wordpress.com/2007/08/17/krisis-konstitusi-iraq/. Diakses Pada Tanggal 02 April 2018. Jam 08:35 WIB.

http://www.dw.com/id/setahun-konstitusi-irak/a-2935187. Diakses Pada Tanggal 01 April 2018. Jam 06:11 WIB.

https://internasional.kompas.com/read/2015/12/21/16530451/Pembunuhan.Minoritas.oleh.ISIS.Dapat.Disebut.Genosida. Diakses Pada Tanggal 05 April 2018. Jam 08:03 WIB.

https://internasional.kompas.com/read/2017/09/24/07432761/akhirnya-pbb-turun-tangan-ungkap-genosida-yazidi-oleh-teroris-isis. Diakses Pada Tanggal 05 April 2018. Jam 08:11 WIB.

https://syaddad.wordpress.com/2008/02/21/islam-dan-jaminan-hak-hak-manusia/. Diakses pada tanggal 24 Mareh 2018. Jam 09: 08 WIB.

http://fiqhmuamalah924.blogspot.co.id/2011/02/teori-hak.html. Diakses pada tanggal 22 Maret 2018. Jam 08:16.

http://fakhrinauval24.blogspot.co.id/. Diakses pada tanggal 23 maret 2018. Jam 07:49 WIB

https://www.kemlu.go.id/baghdad/lc/Pages/Irak.aspx. Diakses Pada Tanggal 02 April 2018. Jam 08:52 WIB.

F. Jurnal/ Paper

Sakni Ahmad Soleh. *Kebebasan Berpikir dan Berkenyakinan dalam Perspektif Jamal Al-Banna* (Palembang: el-Fikr) Vol 1 No 1 Tahun 2017.

Cinthya Megah, *Peran UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES (UNHCR) Dalam Menangani Pengungsi Yazidi Di Irak (2014-2017)*. (Jurnal Online Mahasiswa: Universitas Riau) Jom FISIP Volume 4 No. 2 Oktober. 2017.

Najamuddin Khairur Rijal, Eksistensi dan Perkembangan ISIS: Dari Irak Hingga Indonesia Prodi Hubungan Internasional, paper Universitas Muhammadiyah Malang Tahun 2015.

Masdar Hilmy, Genealogi dan Pengaruh Ideologi Jihadisme Negara Islam Iraq dan Suriah (NIIS) di Indonesia dalam Teosofi, (Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, diterbitkan Prodi Filsafat Agama, Fakultas

Ushuluddin dan Filsafat, UIN Sunan Ampel Surabaya), Volume 04 No. 02 Desember 2014.

G. Laporan-laporan

Christian Peacemaker Teams in Iraq. *Iraq's Yezidis A Religious and Ethnic Minority Group Faces Repression and Assimilation*. 25 September 2005.

Clarion. Special Report the Islamic State. *Laporan Organisasi Clarion Project Tentang Bahaya Islam Radikal*, Tahun 2015.

Global Justice Center: Human Rights Through Rule of Law. Daesh's Gender-Based Crimes against Yazidi Women and Girls Include Genocide.

United Nations Human Rights, *They came to destroy: ISIS Crimes Against the Yazidis*. 15 June 2016.

Nouh El Harmouzi dan Linda Whetstone (Eds), *Islamic Foundations of a Free Society*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Suryo Waskito (London: The Institute of Economic Affairs, 2016).